

Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Hukum
PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Periode Desember 2025

Parameter Pendekatan	Pengungkapan Kualitatif Umum
a. Organisasi Manajemen Risiko Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Bank telah memiliki unit Hukum Administrasi Kredit (HAK) di setiap Kantor Cabang yang yang salah satu tanggung jawab utamanya adalah mengawasi pelaksanaan dan prosedur operasional hukum perkreditan seperti: <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pelayanan kepada nasabah untuk memberikan penjelasan mengenai proses akad kredit. b. Melakukan proses penilaian/plotting agunan kredit, proses pengikatan kredit, pengikatan agunannya dan memantau penyelesaiannya. c. Membuat dan mempersiapkan perjanjian kredit dibawah tangan atau dengan Akta Notaris termasuk dokumen pendukungnya. d. Menyiapkan kelengkapan proses pengikatan agunan dan memantau proses penyelesaiannya. e. Melayani nasabah dalam rangka penandatangan/pencairan kredit dan memberikan penjelasan mengenai perjanjian kredit dan syarat kredit. f. Membuat surat roya hak tanggungan atas agunan kredit yang telah dilunasi dan mencatat pada buku register agunan. g. Melakukan penyelesaian klaim asuransi yang diterima dari mitra Bank. - Bank telah membentuk unit kerja bagian hukum dalam susunan organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan konsultasi dan/atau pendampingan hukum yang dibutuhkan kepada Karyawan, Direksi, Komisaris, mantan Karyawan, mantan Direksi dan mantan Komisaris dalam proses penyelidikan, penyidikan, sampai dengan proses berperkara di pengadilan dalam rangka terkait dengan operasional Bank, dan melakukan kontak secara intensif dengan pihak eksternal (Firma Hukum, Hakim, Kepolisian, Notaris, Pengacara dil) untuk berkoordinasi mengenai masalah hukum yang dihadapi Bank. b. Menetapkan strategi dan memberikan opini dan/atau <i>advice</i> hukum mengenai

	<p>penanganan perkara dan penyelesaian permasalahan hukum, pemberian keterangan saksi/saksi ahli serta mengkoordinasikan dan memfasilitasi saksi ahli serta menindaklanjuti hasil investigasi untuk meningkatkan efektifitas dan kelancaran penyelesaian kasus hukum perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Memastikan hak hukum dan dokumentasi hukum lainnya yang diserahkan oleh pihak ketiga / nasabah sebagai bagian perjanjian hukum dengan Bank. d. Mengawasi dan menerima laporan perkembangan penyusunan kajian dan rekomendasi hukum untuk kepentingan Bank, baik yang melibatkan karyawan/pihak internal dan/atau pihak eksternal serta kajian dan rekomendasi atas berbagai kasus yang terjadi yang berhubungan dengan Peraturan perundang-undangan dan regulasi Perbankan. e. Melakukan kajian terhadap kerjasama dalam pengembangan produk baru dan/atau aktivitas baru yang akan diterbitkan/dilaksanakan oleh Bank. f. Mengajukan analisis dan merekomendasikan alternatif pelaksanaan penyusunan dan pengamanan kebijakan Direksi, mengajukan konsep opini dan/atau <i>advice</i> hukum untuk penyusunan dan pengamanan kebijakan Bank. g. Mengajukan analisis dan kajian dan/atau menyusun masukan/rumusan, rancangan kebijakan dan prosedur yang terkait dengan tugas dan wewenang Bank.
<p>b. Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bank telah melakukan sosialisasi dan memberikan informasi produk hukum BPD Bali secara <i>online</i> dan melakukan <i>addendum</i> perjanjian antara Bank dengan pihak ketiga tentang pemberian pelayanan hukum yang mencakup pemberian pelayanan hukum kepada Bank dalam bidang perbankan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan dengan jalan negosiasi. - Bank telah melakukan audiensi mitigasi risiko hukum gugatan debitur dan penerapan APU-PPT dan PPPSPM dengan kesimpulan perlu dibuatkan format standar surat pernyataan penjualan agunan dibawah tangan sehingga

	<p>terdapat keseragaman di Bagian Penyelamatan Kredit Bank BPD Bali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank telah melakukan kerjasama dengan tim kuasa hukum Bank untuk menangani potensi risiko hukum dari sisi litigasi. - Sosialisasi <i>Antifraud</i> dengan SKAI & AF bersama Tim Pertimbangan Hukum Jabatan (PHJ). - Sosialisasi/<i>gathering/focus group discussion</i> bersama-sama dengan Lembaga Penegak Hukum terkait permasalahan hukum yang dihadapi Bank. - Memberikan Kajian Hukum dalam penyusunan kebijakan perkreditan dengan perkembangan kebijakan regulator dan persaingan pasar, penyusunan kebijakan pengembangan dan diversifikasi produk dan layanan dan penyusunan kebijakan terhadap pengembangan layanan <i>digital banking</i> terkait draf Keputusan Direksi, MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan Pihak lainnya. - Terdapat layanan konsultasi “<i>Hukum Online</i>” yang menjadi salah satu pertimbangan sumber informasi Bank dalam rangka mengatasi potensi litigasi dan non litigasi. - Bahwa dalam melaksanakan pendampingan hukum dan persidangan selalu mengacu pada aturan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0629/KEP/DIR/SEKPER/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Hukum, Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0284/KEP/DIR/KPN/2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0763/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
--	---

	<p>Direksi Nomor 0764/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat serta Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0576/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja.</p> <p>- Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Kejaksaan Tinggi Bali tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara</p>
--	---

✓